

MONITORING EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



0264-8224794



<https://dpmptsp.purwakartakab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sampurasun,

Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada periode berikutnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Purwakarta, Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Hariman Budi Anggoro, ST.MT
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	3
2.1. RENCANA STRATEGIS	3
2.1.1. Sasaran Strategis.....	6
2.1.2. Sasaran Program.....	7
2.2. PERJANJIAN KINERJA	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	32
3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN	32
3.2. RENCANA AKSI.....	33
3.3. CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI.....	43
BAB IV PENUTUP	53
4.1. KESIMPULAN	53
4.2 SARAN TINDAK LANJUT	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah aspirasi dan cita-cita Masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta) memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah daerah maka dibuatlah Laporan Kinerja

yang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

1.2. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi capaian

kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakata Triwulan II tahun 2024 adalah:

1. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaftm strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaftm strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya *good governonce*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar *inline* dengan rencana Pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Dokumen rencana strategis ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan serta penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana strategis ini memuat visi dan misi kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan serta sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:

VISI:

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

Misi 1:

Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Misi 2:

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3:

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4:

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5:

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan. Tujuan adalah merupakan sesuatu

yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dan Renstra DPMPTSP tahun 2024-2026 pada Misi Ketiga dan Kelima yaitu:

Misi Ketiga

Tujuan:

Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat.

Sasaran:

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.

Strategi:

Membangun Iklim Investasi yang Kondusif dan Berkualitas.

Indikator Tujuan:

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.

Misi Kelima

Tujuan:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.

Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.

Strategi:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.

Indikator Tujuan:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat.

2.1.1. Sasaran Strategis

Rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diarahkan berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai, sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa program yang akan dilaksanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam urusan penanaman modal diharapkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan ***“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian”*** sebagaimana termuat dalam dokumen RPD Tahun 2020-2024. Berdasarkan pertimbangan sasaran pembangunan daerah, visi-misi serta tujuan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengampu tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target
Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp. Triliun	6,73	7,2	7,7
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	Predikat	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

2.1.2. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Perumusan Sasaran Program harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hal tersebut telah dijabarkan dalam *Cascading*, *Crosscutting* serta Peta Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang menjadi strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam upaya pencapaian tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta diselaraskan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan langsung dengan program unit organisasi dibawah Eselon II yang mendukung Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja Tahun 2024-2026

No	Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
Meningkatnya Iklim penanaman modal sesuai kebutuhan investor					
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	5,6	5,8	6,0
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	6,73	7,20	7,70
3.	Jumlah investor berskala nasional	PMDN/PMA	730	803	884
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase	28,5	29,0	29,5
Program Promosi Penanaman Modal					
Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal					
5.	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Dokumen	2	2	2
6.	Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	Triliun	7,4	7,9	8,4
Program Pelayanan Penanaman Modal					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal					
7.	Rasio daya serap tenaga kerja (Persen)	Persen	18,5	19,0	19,5
8.	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (Persen)	Persen	94,58	95,58	96,58

9.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	Poin	92,5	93,00	93,50
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal					
10.	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	7,14	8,70	8,70
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
Meningkatnya Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan					
11.	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
12.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dengan demikian, penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. (Triliun)	8 Triliun

2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	Predikat	AA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Persentase)	5,6	110.116.509
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Triliun)	6,73	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	730	
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	28,5	

2.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	2	177.500.000
		Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	7,4	
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja (Persen)	18,5	135.000.000
		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (Persen)	94,58	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	92,5	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	7,14%	585.147.000

5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan		120.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		13.108.837.852
Jumlah				14.236.601.361

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi. Gambaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Indikator kinerja adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Indikator ini sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga individu. Dengan adanya indikator kinerja, dapat mengukur keberhasilaru mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan membuat Keputusan yang lebih baik. Indikator kinerja yang diukur terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU): merupakan indikator yang paling penting dan strategis untuk mencapai visi dan misi organisasi. iku biasanya berfokus pada hasil akhir yang ingin dicapai.
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur spesifik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis suatu organisasi. IKK ini seperti Kompas yang memandu organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKU. IKK lebih spesifik dan terukur dibandingkan IKU.
- c. Indikator Kinerja Individu (IKI): merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja individu dalam mencapai tujuan organisasi.

3.2. RENCANA AKSI

Rencana Aksi DPMPTSP Kabupaten Purwakata tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun rencana aksi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rencana Aksi Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
						I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7				
Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8 T					
		Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal							
		Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen					

		Sub Kegiatan :Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1. Penyusunan Perda Penanaman Modal 2. Perkada dan Kepda di Bidang Penanaman Modal		√		
		Sub Kegiatan : Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Kegiatan Usaha	Rekomendasi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terkena harmonisasi ataupun tumpang tindih				√
		Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen					
		Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha / Purwakarta Investment <i>Project Ready To Offer</i> (IPRO)		√	√	√

		Program : Promosi Penanaman Modal							
		Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen					
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Investment Promotion 2. Kosmik /Videografi Promosi Investasi 3. UMK Naik Kelas/Kemitraan 4. Anvesta		√		√
		Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Tim Peningkatan Investasi Daerah		√		
		Program : Pelayanan Penanaman Modal							

		Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Laporan					
		Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	1. Pelayanan dan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Berusaha dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	√	√	√	√

		Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	Pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan Sosialisasi/Dise minasi informasi penanaman modal	√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaku usaha di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	√	√	√	√
		Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							

		Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen					
		Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	22 Kegiatan Usaha	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan 2. Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan		√		
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	351 Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (BESTIE LKPM)		√	√	

			Berusaha Berbasis Risiko						
		Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	1. Inspeksi Lapangan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3. Pengawasan terintegrasi, Penganugerahan Perusahaan yang mematuhi pelaksanaan perizinan berusaha	√	√	√	√
		Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal							
		Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	1 Dokumen					

		Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	1. Pengembangan aplikasi Gaspol dan Pengembangan MPP Digital 2. Pengolahan data, evaluasi dan pelaporan perizinan penanaman modal (RB ZI, Evaluasi Kinerja PTSP, MPP)		√	√	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat	A, Sangat Baik					
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen					

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		√	√	√	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		√			
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen		√	√	√	√
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan					
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan		√	√	√	√

		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		√			
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	3 laporan		√	√	√	√
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan					

		Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		√	√	√	√
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan					
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket			√		
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang		√	√	√	√
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan					

		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		√			
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		√			
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Paket		√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		√	√	√	√

		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		√			
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan					
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit				√	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit				√	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operas ional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan					

		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan		√	√	√	√
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan					
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		√	√	√	√

		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	465 Unit		√	√	√	√
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2 Unit		√			
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2 Unit				√	

3.3. CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Triwulan II
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp. 8,00 (Triliun)	Rp. 3,1 (Triliun)	46,06
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	AA	Predikat	A,A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik



Realisasi Capaian Kinerja
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Triwulan II Tahun 2024

SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TW ini	S/D TW ini			
Meningkatnya Iklim penanaman modal sesuai kebutuhan investor							-			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5,6	Persen	209.933.259,00		3,00	102.911.250,00	53,57%	49%	
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	6,73	Trilyun Rp.			3,10	-	46,06%		
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	730	Investor			240,00	-	32,88%		
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	28,5	Persen			20,00	-	70,18%		
						-	-			
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						-	-			
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	119.816.750	Penyusunan Perda dan Perkada	-	102.307.750,00	0,00%	0,00%	Perda Perizinan Berusaha
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	Dokumen	20.116.509	Rekomendasi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang terkena harmonisasi	-	-	0,00%	0,00%	
						-	-			
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						-	-			
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	Naskah Akademis RUPM 2025-2030	-	-	0,00%	0,00%	Refocussing Anggaran
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha / Purwakarta Investment Project Ready To Offer (IPRO)	-	603.500,00	0,00%	3,02%	



Realisasi Capaian Kinerja
Program Promosi Iklim Penanaman Modal
Triwulan II Tahun 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TW ini	S/D TW ini	KINERJA	ANGGARAN	
Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal										
Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	177.500.000,00		-	1.452.000,00	-	0,82%	
	Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	7,4	Triliun			5,30	-			Data Olahan LKPM
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						-	-			
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	127.500.000	Pelaksanaan Promosi Investasi	-	760.000,00	0,00%	0,60%	
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Promosi oleh Tim Peningkatan Investasi Daerah	-	692.000,00	0,00%	1,38%	



Realisasi Capaian Kinerja
Program Pelayanan Penanaman Modal
Triwulan II Tahun 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI			PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
								KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TW ini	S/D TW ini			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal										
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja	18,5	Persen	135.000.000,00		6,00	15.177.380,00	32,43%	11,24%	Data LKPM, MPP Teras, SKM dan Sistem Perizinan
	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	94,58	Persen			100,00	-	105,73%		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92,5	Poin			96,05	-	103,84%		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										
Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600	Pelaku Usaha	85.000.000	1. Pelayanan dan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Berusaha dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	72,00	5.305.850,00	12,00%	4,51%	Pelayanan di Tempat
Subkegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	Pelaku Usaha	20.000.000	Pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan Sosialisasi/Diseminasi informasi penanaman modal	8,00	3.836.980,00	16,00%	19,20%	Laporan Pengaduan
Subkegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200	Kegiatan Usaha	30.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaku usaha di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	40,00	6.034.550,00	20,00%	20,12%	Data OSS, Gaspol, Cek Lapangan

Realisasi Capaian Kinerja
Program Pengendalian Penanaman Modal
Triwulan II Tahun 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI			PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
								KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TW ini	S/D TW ini			
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman mod										
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	7,14	Persen	585.147.000,00		1,00	13.443.000,00	14,01%	2,30%	Data Pengawasan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12	Pelaku Usaha	87.771.000	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan 2. Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan	-	-	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	351	Pelaku Usaha	321.832.000	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (BESTIE LKPM)	100,00	10.674.000,00	28,49%	3,32%	Persiapan Bintek
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	22	Kegiatan Usaha	175.544.000	1. Inspeksi Lapangan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3. Pengawasan terintegrasi, Penganugerahan Perusahaan yang mematuhi pelaksanaan perizinan berusaha	12,00	2.769.000,00	27,27%	1,58%	Laporan Pengawasan



Realisasi Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Triwulan II Tahun 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI			PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
								KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TW ini	S/D TW ini			
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal										
	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100	Persen	169.617.000,00		50,00	51.807.000,00	50,00%	30,54%	Pengembangan Sistem Informasi
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	169.617.000	1. Pengembangan aplikasi Gaspol dan Pengembangan MPP Digital 2. SILAPAK PRESTASI 3. Pengolahan data, evaluasi dan pelaporan perizinan penanaman modal untuk pemenuhan data penilaian (Lap Perizinan, RB ZI, Evaluasi Kinerja PTSP, MPP)	2,00	51.807.000,00	66,67%	30,54%	Laporan Perizinan Berusaha, Pengembangan Sistem Perizinan dan Website



Realisasi Capaian Kinerja
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Triwulan II Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.422.110.853	6.017.528.581	44,83%	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.334.000	18.062.900	41,68%	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	66%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.017.000,00	6.055.900,00	40,33%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 Dokumen	3 Dokumen	60%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.141.000,00	8.141.000,00	100,00%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan	1 Laporan	100%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.176.000,00	3.866.000,00	19,16%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00 Laporan	1 Laporan	20%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.512.754.415,00	3.473.912.487	46,24%	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	66%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.492.759.615,00	3.464.729.587,00	46,24%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang	46 orang	82,14



No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.993.900,00	9.182.900,00	91,89%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.900,00	-	0,00%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.00 Laporan	0 Laporan	0%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	4.960.000	24,80%	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	4.960.000,00	24,80%	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00 Laporan	6 Laporan	50%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.881.750	90.060.500	49,52%	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	124.381.750,00	90.060.500,00	72,41%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.00 Paket	4 Paket	400%
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.500.000,00	-		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85.00 Orang	10 Orang	11,76%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	776.378.258	313.724.409	40,41%	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	7 Kegiatan	5 Kegiatan	71%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	25.004.000,00	50,01%	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	100%



No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.869.995,00	42.149.995,00	69,25%	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.504.263,00	136.886.362,00	42,71%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.00 Paket	5 Paket	50%
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.004.000,00	45.769.000,00	36,61%	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20.00 Paket	10 Paket	50%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000,00	-	0,00%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2.00 Laporan	2 Laporan	0%
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	-	0,00%				
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	63.915.052,00	37,60%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.00 Laporan	200.00 Laporan	37,60%
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	-	0,00%	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	852.620.760	98.279.400	11,53%	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
-	Pengadaan Mebel	148.499.400,00	98.279.400,00	66,18%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10.00 Unit	10.00 Unit	100%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	704.121.360,00	-	0,00%	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.182.964.670	1.566.046.282	49,20%	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/ Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	50%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	6 Laporan	50%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	661.200.070,00	322.964.148,00	48,85%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	6 Laporan	50%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.511.764.600,00	1.241.082.134,00	49,41%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40.00 Laporan	20 Laporan	50%



No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.177.000	452.482.603	53,10%	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000,00	32.757.603,00	29,78%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20.00 Unit	8 Unit	40%
-	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	9.500.000,00	47,50%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.00 Unit	2 Unit	50%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	573.297.000,00	372.295.000,00	64,94%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	2 Unit	100%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	37.930.000,00	39,93%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	465.00 Unit	200 Unit	43%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.880.000,00	-	0,00%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	0 Unit	0%

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024.

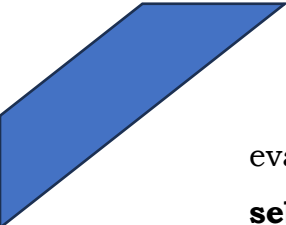
Faktor Penghambat :

1. Pencairan anggaran masih terlambat
2. Koordinasi tim kerja belum selaras

Faktor Pendukung:

1. Digitalisasi pelaporan kegiatan penanaman modal
2. Digitalisasi Pelayanan Perizinan

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Program kerja urusan penanaman modal pada triwulan ini belum dinyatakan dapat dinyatakan berhasil, karena capaian [Kinerja Realisasi Investasi](#) terhadap target sasaran yang telah ditetapkan baru tercapai **46% atau sebesar 3,10 T**, Sedangkan hasil



evaluasi pada aspek kinerja keuangan dengan capaian **44,83 %** atau **sebesar Rp. 6.017.528.581,-**

4.2 SARAN TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Koordinasi antar tim kerja dan peningkatan pemahaman anggota tim terhadap tujuan dan sasaran kinerja.
2. Membuat matrik peran hasil pada setiap tim kerja.